



LAHIRNYA INTELIGENSIA DI ACEH DAN POSISINYA DALAM KONTESTASI FORMASI SOSIAL PASCA FORMALISASI AGAMA

Miswari
IAIN Langsa
miswari@iainlangsa.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the emergence of intellectual movements in Aceh after the occurrence of Dutch colonialism and the start of modernization. As with the phenomena that emerged in the Dutch East Indies in general, the presence of the Dutch in Aceh caused traditional intellectual movements based in Islamic boarding schools to respond to modern public schools which were indicated to carry the spirit of secularism which was considered to endanger the identity of the Acehnese people. The responses that emerged were resistance, negotiation, and accommodation. The research method of this article uses a historical approach based on literature review. The author conducted a review of the literature related to research. The collected data is verified, analyzed, and reconstructed narratively. The research findings show that the intellectual group is divided into three variants, namely the resistant group, namely the traditional intellectual party based on Islamic boarding school education, the negotiative group, namely the modernist intellectual party based on madrasah education, and the accommodative group, namely the secular party based on school education. These three intellectual variants continue to play their role in the formation of social formations in Aceh. After the conflict, due to pressure from social formations, between dayah groups, madrasahs and schools, there was a contestation for dominance. As a result, modernist groups win over discourses and ideas, traditional groups become fighters for modernist ideas and discourse, and secular groups follow the wishes of traditional groups.

Keywords: Intellectual, Acehnese, Traditionalist, Modernist, Secular

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis lahirnya gerakan-gerakan intelektual di Aceh pasca terjadinya Kolonialisme Belanda dan dimulainya modernisasi. Sebagaimana fenomena yang muncul di Hindia Belanda secara umum, kehadiran Belanda di Aceh menyebabkan gerakan intelektual tradisional yang berbasis di dayah memberikan respon terhadap sekolah umum modern yang diindikasikan mengusung semangat sekularisme yang dianggap membahayakan identitas masyarakat Aceh. Respon-respon yang muncul adalah resistensi, negosiasi, dan akomodasi. Metode penelitian artikel ini menggunakan pendekatan historis berbasis kajian kepustakaan. Penulis melakukan kajian terhadap literatur-literatur terkait penelitian. Data yang dikumpulkan diverifikasi, dianalisis, dan direkonstruksi secara naratif. Temuan penelitian menunjukkan, kelompok intelektual terbagi kepada tiga varian yakni kelompok resisten yakni pihak intelektual tradisional yang berbasis pendidikan dayah, kelompok negosiatif yakni pihak intelektual modernis yang berbasis pendidikan madrasah, dan kelompok akomodatif yakni pihak sekuler yang berbasis pendidikan sekolah. Tiga

varian intelektual ini terus menerus memainkan perannya dalam pembentukan formasi sosial di Aceh. Pasca konflik, akibat desakan formasi sosial, antara kelompok dayah, madrasah, dan sekolah, terjadi kontestasi untuk memperebutkan dominasi. Hasilnya, kelompok modernis memenangkan wacana dan ide, kelompok tradisional menjadi pejuang ide dan wacana modernis, dan kelompok sekuler mengikut kepada kehendak kelompok tradisional.

Kata Kunci: Intelektual, Aceh, tradisional, modernis, sekular

Pendahuluan

Secara sosiologis, hal yang paling mudah untuk mengidentifikasi Aceh adalah formalisasi syariat Islam yang rangkaian prosesnya telah dimulai pada 1999 dan mencapai bentuk bakunya pada 2005.¹ Lahirnya formalisasi syariat Islam telah memunculkan euforia bagi kelompok modernis dan tradisional. Proses lahirnya formalisasi syariat Islam tidak terlepas dari gerakan yang dibuat oleh kelompok subversif yang mengusung aspirasi separasi Aceh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Formalisasi keagamaan diberlakukan sebagai jawaban atas konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh. Formalisasi ini sebenarnya merupakan aspirasi dari kelompok modernis yang telah eksis di Aceh sejak masa Kolonialisme Belanda.

Artikel ini hendak mengkaji latarbelakang lahirnya kelompok sekular, kelompok modernis, dan kelompok tradisional. Selanjutnya mengurut sepak terjang mereka menuju masa kini, khususnya pasca formalisasi keagamaan dan hadirnya masa damai di Aceh. Kemudian menganalisis peta formasi kelompok-kelompok intelektual tersebut dalam rangka kontestasi dominasi narasi.

Belanda Masuk ke Aceh dan Dimulainya Modernisasi

Setelah bertarung dengan gagah berani, akhirnya Aceh takluk ke tangan Belanda pada 1874. Perlawanan terus berlangsung hingga 1904. Bahkan gerakan-gerakan itu tidak pernah berakhir hingga 1942. Tekad Belanda untuk menguasai Aceh meningkat setelah dibukanya Terusan Suez, sehingga lalu lintas perdagangan Belanda di Nusantara menjadi semakin intens. Belanda merasa perlu lebih intens dalam mengamankan kapal-kapalnya di Selat Malaka. Sementara Aceh sendiri kerap menenggelamkan kapal-kapal Belanda karena dianggap telah

¹ Muhammad Alkaf, "Aceh Pasca 2005: Ruang Politik Untuk Syariat Islam," in *Islam, Formalisasi Syariat Islam Dan Post-Islamisme Di Aceh*, ed. Miswari (Banda Aceh: BandarPublishing, 2019), 7.

² Ahmad Taufan Damanik, *Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam Ke Imajinasi Etno-Nasionalis* (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI), 2010), 27.

melanggar Perjanjian London pada 1824. Kemudian Belanda dan Inggris membuat Perjanjian Sumatra pada 1871, antara lain berisi penyerahan Guyana Barat kepada Inggris, sementara Belanda mengizinkan Inggris berdagang di Siak. Inggris juga memberikan izin kepada Belanda untuk mengambil tindakan untuk Aceh. Modus tindakan penyerangan yang dilakukan Belanda ke Aceh adalah kecurigaan mereka terhadap Aceh yang coba membangun diplomasi dengan Amerika Serikat, Italia, dan Turki Utsmani di Singapura. Diplomasi yang dicoba bangun Aceh akibat perjanjian Perjanjian Sumatra pada 1871.³

Pasca jatuhnya Aceh dan dimulainya kolonialisasi Belanda, bermulalah babak baru bagi Aceh. Setelah itu, segala sistem sosialnya tidak sama lagi.⁴ Terkhusus pada bidang pendidikan, babak baru dimulai. Sekolah pertama di Aceh dimulai pada 1907, meskipun pada 1905 telah ada pemuda Aceh dari kalangan uleebalang yang telah bersekolah pada sekolah Belanda di Bandung. Kecenderungan pihak uleebalang untuk mendapatkan pendidikan Barat sangat tinggi karena mereka menyadari bahwa pendidikan umum itu adalah bekal mempersiapkan diri menyongsong modernisasi. Siapa saja yang menolak modernitas, tentu akan tertinggal dalam urusan-urusan profan. Sekolah dalam pandangan uleebalang adalah bekal melatih keahlian yang diperlukan dalam berkehidupan.

Sekolah pertama itu didirikan di Ulee Lheue Banda Aceh. Kemudian pada 1908, didirikan pula sekolah di Lam Lagang. Baru pada 1920, sekolah setingkat MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) didirikan. Itu merupakan jenjang sekolah tertinggi yang ada di Aceh. Mr. Teuku Mohammad Hasan yang merupakan produk sekolah, menamatkan pendidikannya di Belanda pada 1933. Dia mendirikan Atjehsche Studiefonds (Dana Pelajar Aceh) untuk membantu anak-anak Aceh yang cerdas namun tidak memiliki dana. Dia juga mendirikan Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak (PUSAKA) untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi pribumi. Pada 1937 didirikan Perguruan Taman Siswa di Aceh yang merupakan cabang dari Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara.⁵

Dalam hal ini, Teuku Mohammad Hasan punya peran penting dalam modernisasi sistem

³ Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh* (Jakarta: Buku Obor, 2007), 271.

⁴ Jurnal Inovasi Penelitian et al., "Strategi Perang Semesta Dalam Perang Aceh (1873-1912)," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2537-48, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/517>.

⁵ Firman Parlindungan et al., "Fostering Peace and Harmony Through Indonesian Heroes Story: A Systematic Review of Literature," *Proceedings of the 4th International Conference on Progressive Education 2022 (ICOPE 2022)*, 2023, 356.

pendidikan di Aceh. Sebelum kehadiran Belanda, dayah merupakan satu-satunya sistem pendidikan yang ada di Aceh. Sejarah dayah memiliki akar sejarah yang sangat panjang yakni hingga Kesultanan Peureulak. Sekitar kepemimpinan kedua di Kesultanan Peureulak dalam dinasti Al-Aziziyah—yakni nama yang dinisbahkan kepada sultan pertama, Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah,—dayah pertama didirikan di Aramia, Bayeun, Aceh Timur. Dayah itu diberi nama Zawiyah Cot Kala. Meurah Muhammad Amin kemudian menjadi pemimpin di dayah tersebut dan kemudian dia dilantik menjadi sultan di Peureulak mewakili dinasti Meurah untuk menggantikan dominasi dinasti Al-Aziziyah yang dimulai dari sultan pertama Kesultanan Peureulak, Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Meurah Muhamamad Amin menimba ilmu di Timur Tengah dan ketika kembali ke Peureulak, menjadi ulama yang sangat dihormati. Di antara ajaran agama yang diperjuangkan adalah mencoba menyingkirkan beberapa budaya lokal yang masih dilestarikan dinasti Al-Aziziyah. Antara lain sistem pertentangan sosial budaya inilah yang memicu munculnya ketegangan politik antara dinasti Meurah dan dinasti Al-Aziziyah, sehingga menyebabkan Kesultanan Peureulak terpecah menjadi dua dinasti.⁶

Selanjutnya Dinasti Al-Aziziyah tersingkir dan mendirikan kekuasaan di Salasari (Cot Girek, Aceh Utara) hingga anak keturunannya mencapai Meurah Mulia (Aceh Utara) dan menguasai pantai utara Aceh. Dari sanalah Kesultanan Pasai didirikan. Di Pasai, dayah yang sempat menjadi pusat pendidikan terbesar di Asia Tenggara yakni Dayah Blang Pria berdiri. Para penguasa muslim dari seluruh Asia Tenggara mengirimkam putra-putra terbaik mereka untuk menimba ilmu di dayah Blang Pria. Setidaknya empat di antara sembilan Wali Songo adalah alumni dayah Blang Pria.⁷ Maulana Malik Ibrahim sendiri merupakan putra Pasai yang tentu saja merupakan alumni dayah Blang Pria yang pergi menuntut ilmu ke Timur Tengah. Saat pulang ke Pasai, kondisi tidak memungkinkannya mendarat karena negeri itu sedang diserang Majapahit. Kemudian para pelajar yang pulang dari Timur Tengah itu pergi ke Jeumpa. Maulana Malik Ibrahim memperistri putri raja Jeumpa pada masa itu dan memiliki seorang putra bernama Raden Rahmat yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Maulana Malik Ibrahim bersama keluarga dan rekan-rekannya berhijrah ke Gresik. Setelah dewasa,

⁶ Ismail Fahmi Arrauf Nasution and Miswari, “Rekonstruksi Identitas Konflik Kesultanan Peureulak,” *Paramita* 27, no. 2 (2017): 168–81, <https://doi.org/10.15294/paramita.v27i2.11159>.

⁷ Miswari, “Kesultanan Samudra Pasai Dan Strateginya Dalam Islamisasi Nusantara,” *Liwaul Dakwah* 12, no. 1 (2022): 40–60.

ketika kondisi Pasai menjadi kondusif, Raden Rahmat kembali ke Pasai untuk menimba ilmu di dayah Blang Pria. Kemudian ke Tuban untuk menyebarkan ilmu agama. Putra dari Raden Rahmat, Raden Maulana Makdum Ibrahim atau dikenal dengan nama Sunan Bonang, juga ke Pasai untuk menimba ilmu di dayah Blang Pria. Kemudian ke Tuban untuk mendirikan lembaga pendidikan agama. Komunitas agama yang dibangun Sunan Bonang menjadi arsitek berdirinya Kesultanan Demak. Banyak murid Sunan Bonang adalah petinggi Majapahit, termasuk Raden Patah. Sementara itu, Maulana Malik Ibrahim memiliki saudara laki-laki bernama Maulana Sayid Ishak. Maulana Sayid Ishak memiliki putra bernama Raden Paku atau dikenal dengan nama Sunan Giri. Sunan Giri ke Pasai untuk menimba ilmu dan kemudian pergi menunaikan haji. Ketika kembali ke Jawa, Sunan Giri mendirikan lembaga pendidikan yang murid-muridnya kebanyakan dari masyarakat biasa. Pada masa itu, penyebaran Islam di Jawa sudah sangat luas.⁸

Nama-nama tokoh besar lainnya yang merupakan alumni dayah Blang Pria adalah Hamzah Fansuri, Ali Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Saiful Rijal, Hasan Fansuri, Abdurrauf Al-Singkili, dan banyak nama lainnya. Dua nama pertama hijrah ke Singkil untuk mendirikan dayah di sana. Dayah di Singkil mencapai kejayaannya di bawah kepemimpinan Ali Fansuri. Dayah tersebut menjadi kiblat ilmu pengetahuan sepanjang pantai barat Sumatra. Selain melahirkan ulama yang berasal dari Barus, Minang, dan Batak, Dayah Singkil juga banyak mendatangkan pengajar dari Timur-Tengah. Alumni-alumni dari dayah Singkil juga banyak yang pergi ke Timur tengah untuk menimba ilmu. Sebagian di antara mereka kembali ke Dayah Singkil, sebagian kembali ke daerah masing-masing untuk mendirikan dayah. Daerah yang paling banyak berkembang ilmu pengetahuan agama berkat warisan dayah Singkil yakni Barus (sekarang: Sumatera Utara) dan Fansur (Ujong Pancu, Aceh Besar).⁹ Adapun Syamsuddin Al-Sumatrani, Saiful Rijal, Hasan Fansuri merupakan tokoh penting dalam membesarkan Dayah Baiturrahman di Kutaraja. Dayah Kutaraja pada masa kejayaannya menjadi pusat aktivitas keilmuan dan keagamaan Asia Tenggara. Dayah tersebut merupakan pusat pendidikan terbesar dan memiliki jenjang pendidikan Islam tertinggi di Asia Tenggara.

⁸ Nofal Liata, "Islam Aceh Dan Walisongo," accessed July 30, 2023, <https://nofalliaata.wordpress.com/agama-islam-dan-sekte-sektenya/islam-aceh-dan-walisongo-2/>.

⁹ Miswari, *Perbandingan Wujudiah Hamzah Fansuri Dan Filsafat Mulla Sadra* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 122-23.

Kitab-kita level tinggi dikaji disana. Selanjutnya dayah berkembang di Syiah Kuala, Kuta Raja dipimpin oleh Abdurrauf Al-Singkili.

Dayah Syiah Kuala mengambil posisi Dayah Baiturrahman sebagai pusat pendidikan keagamaan Asia Tenggara. Burhanuddin Ulakan, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Abdulmalik bin Abdullah, Dawud al-Jawi ar-Rumi, dan banyak lainnya yang kemudian menjadi ulama di berbagai kawasan di Asia Tenggara. Sehingga Abdurrauf Al-Singkili sering diberi gelar sebagai guru para ulama Nusantara. Itikad Ahlu Sunnah wal Jamaa'ah yang diajarkannya menjadi paham keagamaan dominan masyarakat Muslim Asia Tenggara. Di Aceh, keulamaan Abdurrauf Al-Singkili diwarisi oleh, Dawud Al-Jawi ar-Rumi. Abdurrauf Al-Singkili mengarang kitab fikih yang menjadi pedoman ulama Asia Tenggara hingga hari ini. Sehingga dapat dikatakan, corak keagamaan masyarakat muslim Asia Tenggara berkiblat pada Abdurrauf Al-Singkili.¹⁰

Selanjutnya dayah di Aceh yang menjadi kiblat keagamaan adalah Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan. Dayah ini dipimpin oleh ulama kharismatik bernama Abuya Muda Waly.¹¹ Beliau berhasil mendidik banyak santri yang kemudian menyebar di seluruh Aceh, Sebagian dari mereka berbaur dengan masyarakat dan memberikan warna religius bagi elemen masif masyarakat. Sebagian lainnya mendirikan dayah di berbagai kawasan di Aceh. Dayah-dayah yang didirikan Abuya Muda Waly tersebar di seluruh Aceh. Salah satu dayah besar yang dipimpin oleh murid Abuya Muda Waly adalah dayah Ma'had Ulumu Diniyah Islamiyah di desa Masjid Raya, Kecamatan Samalanga, Bireuen. Dayah itu dipimpin oleh Abon Aziz. Kemudian pada masa Abu Syekh Hasanoel Basri HG yang dikenal dengan nama Abu Mudi, dayah tersebut berkembang pesat. Bahkan mereka menerima sebagian dimensi modernitas sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar dayah yang berlandaskan pada sistem pendidikan tradisional, antara lain seperti mengajarkan agama secara sistematis dimulai dari kitab-kitab rendah hingga kitab-kitab dengan level tertinggi. Setiap pengajar sistem tradisional haruslah mereka yang telah lama mendapatkan pendidikan di dayah. Setiap

¹⁰ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "Educational Practice: Lessons to Be Learned from Madrasah and Religious Schools in Contemporary Southeast Asia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 1 (June 1, 2015): 29, <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.29-48>.

¹¹ Teuku Wildan, Sukiman Sukiman, and Amroeni Drajat, "Thinking of Kalam Ulama Aceh XX Century Shaykh Mudawali Al-Khalidi (1917-1961)," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCIJournal): Humanities and Social Sciences* 2, no. 4 (November 26, 2019): 657-65, <https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.679>.

pengajar tentunya adalah mereka yang punya sanad keilmuan yang jelas dan mendapatkan izin atau ijazah dari pimpinan dayah.¹² Dayah Mudi Mesra Samalanga mengedepankan prinsip *beut seumeubet*, yakni mengaji dan mengajar mengaji. Artinya, dayah Mudi Mesra Samalanga menekankan santrinya untuk senantiasa belajar agama dan juga bersemangat untuk mengajar masyarakat. Sebab itulah, dayah yang mengusung nama Al-Aziziyah, yang mana nisbah Al-Aziziyah tersebut dialamatkan kepada Abon Aziz Samalanga, menyebar di seluruh Aceh.¹³

Sebenarnya dayah merupakan jenjang tertinggi dalam hirarki pengajaran agama tradisional di Aceh. Secara teoretik, jenjang pertama belajar agama (disebut mengaji) adalah di rangkang, yakni balai kecil yang dikelola oleh teungku-teungku gampong, yakni ahli agama desa setempat, yang setidaknya telah menamatkan mengaji di tingkat meunasah.¹⁴ Pada tingkatan rangkang, umumnya belajar mengaji hanya mempelajari Al-Qur'an kecil yakni kaidah membaca Al-Qur'an, nasehat-nasehat tentang ketauhidan, dan dasar-dasar akhlak sepada orangtua dan guru. Tingkat selanjutnya adalah mengaji di bale. Pada tingkat ini, santri harus telah mampu membaca Al-Qur'an, mengaji pada Juz 30 Al-Qur'an, seta diajarkan kitab-kitab dasar tentang tauhid dan ibadah seperti kitab *Masailal Muhtadi*. Pengajar di bale adalah yang telah menempuh jenjang pendidikan dasar di dayah atau setidaknya tamat dari meunasah.

Selanjutnya adalah mengaji di meunasah, dengan mempelajari kitab-kitab seperti *Bidayah* dan *Sabil Muhtadin*. Pengajar di meunasah haruslah mereka yang telah menempuh pendidikan di dayah. Selanjutnya dilanjutkan mengaji di dayah yang biasanya terdapat satu dayah di setiap mukim. Biasanya dayah tersebut terletak dekat masjid kemukiman. Di dayah diajarkan kitab-kitab seperti *Kitab Delapan*, dan diajarkan ilmu nahwu seperti *Ajrumiyah*, *Mukhtasar*, *Muthmainnah*, hingga *Alfiyah*. Pengajian terkait fikih sangat banyak antara lain kitab *Safinatun Naja*, *Matan Taqrib*, *Fathur Qarib*, *Fathur Muin*, *Tahrir*, *Iqna*, *Fathu al-Wahab*, *Mahally*, *Tuhfan*, dan *Nihayah*. Pada dayah tinggi atau dayah manyang, yang sering juga disebut dayah Teungku Chik, yakni dipimpin oleh ulama yang digelar Teungku

¹² Ismail Fahmi Arrauf Nasution, Miswari Miswari, and Sabaruddin Sabaruddin, "Preserving Identity through Modernity: Dayah Al-Aziziyah and Its Negotiations with Modernity in Aceh," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (July 30, 2019): 211–32, <https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.06>.

¹³ Ismail Fahmi Arrauf Nasution, Miswari Miswari, and Ilham Dwitama Haeba, "Traditionalism of Tolerance in Dayah System: A Reflective Note on the Biography of Abon Aziz Samalanga of Aceh," *Religia* 23, no. 1 (April 3, 2020): 1–21, <https://doi.org/10.28918/religia.v23i1.1957>.

¹⁴ Mukhlisuddin Ilyas, *Pendidikan Dayah Di Aceh Mulai Hilang Identitas* (Yogyakarta: Pale Indonesia Media, 2012).

Chik, selain mempelajari ushul fiqih, nahwu, sharaf, juga dipelajari tafsir, musthalah hadits, ilmu mantiq, ilmu falaq, dan tasawuf. Kajian fikih menjangkau tema jinayah, akhwal syaksyah, mu'amalah. Dalam sejarah, antara dayah yang punya level pengajaran tinggi di Aceh antara lain Dayah Tiro, Dayah Tanoh Abee, Dayah Darussalam Labuhan Haji, dan beberapa dayah lainnya.¹⁵

Pada masa pergolakan perang melawan kekuasaan Belanda, bahkan ada dayah-dayah tinggi juga mempelajari ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu teknik, dan ilmu-ilmu militer. Sebab itulah, Pemerintah Kolonial melakukan pengawasan terhadap dayah-dayah yang ada di Aceh. Hasilnya adalah, dayah-dayah itu harus mendapatkan izin dari Belanda. Dalam hal ini, banyak dayah yang ditentang Pemerintah Kolonial akibat tidak patuh. Kontrol Belanda atas dayah menjadi penanda eksistensi dayah pada masa modern di Aceh. Karena dayah-dayah yang dibenarkan eksis hanyalah dayah-dayah yang bersedia tunduk pada aturan Belanda, antara lain tidak mempelajari ilmu-ilmu kecuali terkait fikih ibadah, tauhid, dan tasawuf aliran tertentu. Sebagian pemimpin dayah berpikir bahwa bila dayah berada di bawah kontrol Belanda, ia tidak akan efektif, sehingga memilih untuk tidak melanjutkan dayahnya atau berada di bawah tanah. Sebagian pemimpin dayah berpandangan, daripada tidak melakukan pendidikan agama sama sekali, itu sangat berbahaya bagi generasi selanjutnya, sehingga memilih untuk melaporkan dayahnya kepada kolonial. Lebih tiga puluh dayah yang kemudian diberikan izin eksis oleh Kolonial.

Akibat dari kontrol kuat oleh pihak Kolonial, sistem pendidikan tradisional hanya mempelajari kaidah-kaidah keagamaan, sehingga mereka menjadi tertinggal dalam menghadapi perkembangan jaman. Antara lain karena persoalan ini, sebagian elite intelektual yang berasal dari dayah memilih melakukan gerakan modernisasi dengan mengusung modernisasi Islam. Antara lain seperti Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap, Abu Hamid Samalanga, Sayid Husin Syahab dan beberapa nama lainnya. Di antara mereka mendirikan madrasah untuk menjembatani kemajuan sekolah dan signifikansi pendidikan agama.

¹⁵ Ismail Fahmi Arrauf Nasution and Miswari Miswari, "Al-'Ulamā' Warathat Al-Anbiyā': Modernity and Nurture of Authority in Aceh Society," *Jurnal THEOLOGIA* 30, no. 2 (December 23, 2019): 197, <https://doi.org/10.21580/teo.2019.30.2.3845>.

Kehadiran madrasah di Aceh, sebagaimana yang terjadi secara umum di Indonesia, tidak lepas dari peran-peran yang dilakukan oleh kelompok modernis. Kelompok modernis adalah mereka yang memandang bahwa sistem pendidikan tradisional tidak cukup bila hanya dengan menempuh pendidikan di dayah. Setidaknya, di Indonesia, gerakan modernisasi Islam diprakarsai oleh Samanhoedi melalui Sarekat dagang Islam, yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto. Sarekat Dagang Islam lahir akibat respon terhadap dominasi perdagangan Tionghoa yang mendapatkan dukungan lebih baik dari Pemerintah Kolonial.¹⁶ Hal ini menjadi tipikal modernis sepanjang sejarahnya, yakni reaksi terhadap ragam peristiwa. Misalnya mengerasnya sikap partai Islam di Parlemen pada masa Orde Lama akibat agresivitas Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan esensi kehadiran kelompok modernis sendiri, baik di Aceh secara khusus dan di Indonesia secara umum, adalah karena dua arah, yakni kurangnya dinamisme sistem pendidikan tradisional dan berkembangnya pendidikan sekuler yang diprakarsai Kolonial.

Cabang Sarekat Islam (SI) berdiri di Aceh pada 1916, cabang Muhammadiyah di Aceh berdiri pada 1932, dan Jong Islamieten Bond (JIB) juga hadir di Aceh pada 1932. Tidak hanya pada usaha gerakan Islam, organisasi modernis itu juga melakukan gerakan-gerakan ekonomi di Aceh. Organisasi ini dikelola oleh kalangan elite Aceh yang umumnya berlatar pendidikan sekuler, namun merasa perlu untuk menggerakkan keagamaan sebagai bagian dari kehidupan, karier, dan pemenuhan spiritual. Sebab itulah sekularisme di Aceh khususnya, dan di Indonesia umumnya, tidak dapat disamakan dengan sekularisme yang didefinisikan dan dijelaskan oleh Harvey Cox,¹⁷ melainkan sesuai dengan makna sekular yang didefinisikan oleh Nurcholish Madjid, yakni sebuah sikap membedakan antara dimensi agama yang sakral, dan dimensi-dimensi duniawi yang profan, karena dua hal tersebut memiliki pendekatan dan metode yang berbeda.¹⁸ Definisi sekular yang dipahami Nurcholish Madjid inilah yang dimaksud untuk kelompok

¹⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, 8th ed. (Jakarta: LP3ES, 1996), 114.

¹⁷ Fauzan Fauzan, "Sekularisasi Dalam Pandangan Harvey Cox," *KALAM* 6, no. 2 (February 25, 2017): 251, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i2.406>.

¹⁸ Zainal Abidin, "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Harmonisasi Antara Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemoderenan," *Humaniora* 5, no. 2 (October 30, 2014): 665, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3123>.

sekular di Aceh dalam artikel ini. Di tambah lagi, umumnya masyarakat Aceh, meskipun pembentukan fondasi paradigmanya sekuler, tetapi setidaknya telah mendapatkan pendidikan dasar agama di rangkang, bale, dan meunasah. Kelompok modernis juga demikian.

Para pengusaha di Aceh juga mendirikan Islam Menjadi Satu pada 1918. Kemudian didirikan Perkumpulan Usaha Sama Kemajuan Aceh. Organisasi-organisasi modernis khas Aceh ini didirikan antara lain untuk membuat perbedaan dengan organisasi-organisasi Islam modernis Nasional yang dibawa dari luar Aceh seperti Muhammadiyah, JIB, dan SI. Kelompok sekular dan kelompok modernis punya peran dalam usaha-usaha mendirikan gerakan Islam modern. Kelompok sekular memberikan perhatian kepada modernisme secara umum, termasuk kepada usaha modernisasi agama. Sebab itulah mereka terlibat. Namun, berbeda dengan kelompok modernis yang menjadikan gerakan-gerakan modernisasi agama sebagai ideologi, kelompok sekular hanya menjadikan modernisasi agama sebagai bagian dari modernisasi sosial. Sebab itulah, madrasah pertama yang berdiri pada 1916, digagas oleh Tuanku Raja Keumala yang merupakan bangsawan di Aceh. Umumnya memang pihak bangsawan, baik keluarga sultan maupun keluarga uleebalang dapat dikatakan sekuler dalam makna yang telah dijelaskan di atas, Tuanku Raja Keumala sendiri memang berlatar belakang pendidikan sekuler. Selain itu, Teuku M. Daud Panglima Polem mendirikan Madrasah Iskandar Muda.¹⁹

Sayid Husin Syahab mendirikan Madrasah Ahlussunnah Waljamaah di Idi, Aceh Timur pada 1928. Di Matanggumpangdua, Bireuen, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap mendirikan Madrasah Al-Muslim.²⁰ Selanjutnya pada 1931, Daud Beureueh mendirikan Madrasah Saadah Adabiah di Blang Paseh, Pidie. Terdapat juga madrasah-madrasah yang berafiliasi dengan madrasah modernis di luar Aceh seperti Al-Irsyadi di Lhokseumawe yang berafiliasi dengan Al-Irsyad Surabaya, Thawalib di Tapak Tuan yang berafiliasi dengan Thawalib di Sumatera Barat.

Puncak konsolidasi modernis terjadi pada pendirian Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada 1939 di Matangglumpangdua, Bireuen. Sebagaimana dikatakan bahwa elit

¹⁹ Alfian, "Ulama Dalam Masyarakat Aceh," in *Islam Di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah* (Jakarta: LP3ES, 1989), 176.

²⁰ Saifullah, *Pembaruan Pendidikan Islam Di Aceh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 86.

berlatar belakang pendidikan sekular di Aceh juga punya ruang untuk Islam, khususnya untuk modernis, sebab itulah Teuku Muhammad Johan Alamsyah, uleebalang Peusangan memfasilitasi berdirinya PUSA. Organisasi ini diprakarsai oleh beberapa modernis, khususnya Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Pimpinan PUSA adalah Daud Beureueh. Teuku Muhammad Johan Alamsyah sendiri merupakan pemimpin yang mendapatkan pendidikan sekuler dengan baik. Dengan kemampuan inilah Teuku Muhammad Johan Alamsyah dapat membangun perekonomian masyarakat dan menciptakan stabilitas politik. Dukungannya terhadap Jami'ah Al-Muslim yang mulai digagas pada 1929 merupakan bagian dari komitmennya dalam membangun kualitas pendidikan.

Di antara tujuan didirikannya PUSA adalah menjadi wadah pemersatu muslim modernis, memajukan pendidikan, khususnya pendidikan Islam modern, memajukan ekonomi, dan lainnya. Selain nama-nama yang telah disebutkan, modernis lain seperti Abu Hamid Samalanga, Abdul Wahab Seulimuem, Nur El Ibrahimy, T.M. Amin, Tgk. Ismail Jacub, Teungku Abdullah Ujong Rimba, dan beberapa nama lainnya. Norma Islam Institut merupakan salah satu aktualitas daripada usaha pemajuan pendidikan oleh PUSA.²¹ Lembaga pendidikan yang berdiri di Kota Bireuen tersebut dipimpin oleh Nur El Ibrahimy. Meskipun tidak lama berdiri, Norma Islam Institut menjadi penanda bangkitnya gerakan modern Islam di Aceh. Lembaga tersebut telah melahirkan banyak tokoh yang berpengaruh di Aceh seperti Abdullah Arif, Ismuha, Hasan Tiro, Zainal Abidin Tiro, Ismail Thaib Paya Bujok, AR Hasyim, Hasan Saleh, dan lainnya. Di samping itu, PUSA juga mendirikan Madrasah Diniyah Idi (Madani) di Kota Idi, JADAM didirikan di Montasik, Aceh Besar, Sekolah Menengah Islam (SMI) di Blang Padang, Banda Aceh, dan beberapa lembaga pendidikan Islam lainnya.

Pasca Kemerdekaan, madrasah-madrasah yang masih bertahan banyak yang menjadi berada di bawah pengawasan pemerintah. Jenjang-jenjang pendidikan madrasah juga menjadi lebih sistematis. Jenjang sekolah dasar disebut madrasah ibtidaiyah, setingkat menengah pertama disebut tsanawiyah, dan jenjang tingkat atas disebut aliyah. Untuk jenjang sekolah tinggi disebut jami'ah. Madrasah-madrasah itu tentu saja menjadi konsentrasi kelompok modernis. Mereka tidak memberlakukan pembelajaran agama secara sistematis sebagaimana dilakukan sistem tradisional. Tidak juga terlalu berpatokan pada sanad keilmuan yang menjadi

²¹ Khairil Miswar, "Bireuen Sebagai Kota Pendidikan," *Pikiran Merdeka*, 2018, <https://www.pikiranmerdeka.co/news/bireuen-sebagai-kota-pendidikan/>.

kualifikasi pendidik di dayah. Madrasah melakukan penyederhanaan sedemikian rupa atas pembelajaran agama, kemudian memasukkan muatan-muatan studi umum di dalamnya. Oleh sebab itulah, mata pelajaran di madrasah sangat banyak, meliputi pembelajaran agama dan pelajaran-pelajaran umum. Namun kedua bidang keilmuan tersebut perlu disederhanakan sedemikian rupa. Sebab itulah, kualifikasi keilmuan agama madrasah tidak sistematis pola yang diterapkan kelompok tradisional. Demikian juga bila dihadapkan dengan sistem sekolah dalam hal ilmu-ilmu umum, banyak madrasah yang belum mampu mengimbangi.

Meskipun demikian, dalam urusan-urusan profan seperti penguasaan sistem birokrasi, politik, pemerintahan, dan managerial lainnya, kelompok modernis memiliki kecakapan dibandingkan kelompok tradisional. Sebab itulah, kelompok modernis ikut terlibat dalam sistem birokrasi, khususnya urusan-urusan keagamaan. Sementara elit kelompok tradisional fokus pada pendidikan agama di dayah dan jenjang-jenjang bawahnya. Karena sangat dominan dalam masyarakat, khususnya di Aceh, varian tradisional memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk identitas masyarakat Aceh yang religius. Namun makna religius yang dimaksud bukan terkait simbol-simbol, melainkan dalam makna yang lebih esensial.

Umumnya ciri khas masyarakat Aceh memiliki keimanan yang kuat, penguasaan tata cara ibadah yang sistematis, dan memiliki akhlak yang cukup mulia. Hal itu terjadi tentu saja karena pengaruh pendidikan dayah dan jenjang-jenjang di bawahnya yang menekankan pentingnya akidah, ilmu ibadah, dan akhlak mulia. Sebelum dayah Al-Aziziyah berkembang, banyak elit dayah yang tidak terjun ke dunia pendidikan (mendirikan dayah) melainkan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat rural dengan menjadi petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya. Kehadiran mereka benar-benar menentukan prinsip sosial masyarakat.

Fenomena sosial yang terjadi di Aceh akibat dominasi kelompok sosial yang belajar agama secara sistematis adalah munculnya masyarakat yang tidak mengedepankan simbol-simbol agama yang mencolok, namun memperlihatkan esensi keagamaan melalui kesantunan, kejujuran, dan teguh pendirian. Karena memang sejatinya agama adalah sumber inspirasi. Bandingkan dengan sebagian kelompok modernis yang lebih mengedepankan simbol dan menjadikan agama sebagai aspirasi. Sebagian modernis mengedepankan simbol-simbol agama dan menjadikannya sebagai sumber aspirasi.

Sebagian modernis lebih menguasai birokrasi sehingga aspirasi-aspirasi itu diusahakan

menjadi sistem. Mereka merasa beragama yang aman dan nyaman adalah dengan munculnya sistem-sistem. Karena memang pola kehidupan mereka dekat dengan sistem administratif dan birokratif. Aspirasi ini menjadi semakin memuncak ketika Orde Baru menerapkan sistem birokrasi yang lebih sekuler. Di Aceh, puncak perlawanan yang muncul pada masa Orde Baru adalah larangan jilbab bagi siswi sekolah. Antara lain inilah yang menjadi kesadaran modernis bahwa kebebasan beragama baru bisa hadir ketika sistem birokrasinya diislamisasi. Tidak hanya lembaga pendidikan, modernis menginginkan lembaga hukum, perbankan, dan lain sebagainya diislamisasi.²²

Modernis menyadari bahwa sistem pemerintahan, ekonomi, dan politik yang diusung pemerintah terlalu banyak mengambil semangat sistem Barat. Sehingga muncul gerakan kritis atas produk-produk sosial dari Barat. Modernis memiliki konsentrasi untuk mengevaluasi segala hal yang dianggap sebagai produk Barat seperti ekonomi, politik, humanisme, dan ilmu pengetahuan. Karena sebagian modernis reaktif pembaratan, maka hal tersebut memacu mereka untuk bangkit untuk melawan dominasi Barat, utamanya melalui islamisasi. Sebagian di antara mereka menginginkan pemerintahan, ilmu pengetahuan, hukum, ekonomi, pendidikan, untuk diislamisasi.²³

Dalam sejarahnya, akibat kekhawatiran atas hilangnya identitas, islamisasi pemerintahan awalnya terjadi dengan sangat radikal, yakni mengislamisasi negara.²⁴ Usaha itu diprakarsai kelompok modernis seperti Kartosuwiryo, Kahar Muzakkar, dan pemimpin PUSA, Daud Beureueh. Kelompok Islamis tersebut lebih mengedepankan simbolisme keagamaan sehingga negara sekalipun harus menjadi negara Islam. Bandingkan dengan kelompok tradisional yang lebih mengedepankan esensi agama seperti keimanan, ibadah, dan akhlak mulia. Di samping itu, kelompok tradisional yang mendominasi masyarakat rural, tidak punya persentuhan intens dengan birokrasi, perkembangan sains, dan dimensi lainnya dari globalisasi. Sehingga mereka lebih fokus pada sistem tradisional yang menjalankan kehidupan sederhana melalui ibadah-ibadah, pendidikan tradisional, dan muamalah tanpa hubungan erat dengan kapitalisme. Namun tidak sedikit modernis yang berpandangan progresif tidak menginginkan kesatuan

²² Ismail Ismail and Mukhlis Mukhlis, "Dari Islamisasi Ilmu Menuju Pengilmuan Islam: Melawan Hegemoni Epistemologi Barat," *Ulumuna* 17, no. 1 (November 8, 2017): 65–96, <https://doi.org/10.20414/ujis.v17i1.174>.

²³ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam Dan Filsafat Sains* (Bandung: Mizan, 1995), 19–20.

²⁴ Azyumardi Azra, "Kartosuwiryo Dan NII: Kajian Ulang," *Studia Islamika* 21, no. 1 (July 21, 2014): 175–82, <https://doi.org/10.15408/sdi.v21i1.883>.

bangsa terganggu akibat politik identitas.

Sebagian modernis yang menyebar di kawasan urban, yakni dalam periode modern ditandai dengan transportasi kereta api. Sehingga pemikiran-pemukiman kelompok modernis adalah di daerah-daerah perkotaan yang terdapat stasiun kereta api. Di sana terdapat lembaga birokrasi, sistem kapital, hal-hal lainnya yang bersinggungan erat dengan kelompok modernis. Sehingga membuat mereka merasa perlu bereaksi atas problem-problem yang sehari-hari dihadapi. Namun untuk menyuarkan aspirasinya itu, sebagian kelompok modernis kerap mengatakan bahwa itu adalah problem masyarakat muslim seluruhnya. Padahal kelompok tradisional tidak memiliki intensitas yang tinggi dalam menghadapi sistem-sistem yang dikeluhkan sebagian modernis.

Perlawanan modernis yang secara keras menggerakkan aspirasinya seperti Kartosuwiryo dan Kahar Muzakkar berhasil dituntaskan. Meskipun tentu saja, gerakan radikal semacam itu tetap saja menyimpan bibit dan warisan dari generasi ke generasi bagaikan api dalam sekam. Sementara perlawanan Daud Beureueh baru bisa diredam setelah banyak pengikutnya memilih turun gunung. Di antara tindakan yang oleh sebagian sarjana dianggap sebagai kompensasi dalam meredam perlawanan di Aceh adalah didirikannya Komplek Mahasiswa (Kopelma) Darussalam di Banda Aceh yang kini menjadi tempat berdirinya perguruan tinggi keagamaan.²⁵ Komplek ini oleh modernis dimaksudkan sebagai zona pengembangan intelektualisme modernis yang semangatnya diambil dari zona perkembangan intelektualisme tradisional di Darussalam, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Perguruan tinggi keagamaan merupakan wadah berkumpulnya kelompok modernis. Pembelajaran agama di sana menggunakan sistem kurikulum, manajemen, administrasi, birokrasi. Di samping perguruan tinggi agama, banyak modernis juga mengisi kantor-kantor pemerintahan, khususnya departemen keagamaan.

Dalam sejarahnya, ketika pemberontakan Daud Beureueh terjadi, banyak modernis yang ikut memberontak. Banyak di antara mereka terdiri dari modernis yang tidak terlibat dalam birokrasi. Sementara sebagian lainnya meninggalkan tugas birokrasi untuk pergi memberontak. Pasca perdamaian yang ditandai dengan momen Ikrar Lamteh pada 1962, untuk membangun Aceh, sekaligus oleh sebagian pengkaji dianggap untuk menghindari muncul kembali pemberontakan, kemudian banyak didirikan lembaga-lembaga yang mampu

²⁵ Hasan Basri, *Melampaui Islam Substantif: Biografi Politik Ali Hasjmy* (Langsa: Zawiyah, 2015), 4.

menyerap aspirasi modernis. Misalnya didirikannya perguruan tinggi keagamaan sebagai wadah pendidikan modernis. Lembaga ini dipimpin oleh Ali Hasjmy dan rekan-rekan modernis lainnya. Didirikan juga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) pada 1965 sebagai wadah konsolidasi cendekiawan modernis dan lembaga diskusi keagamaan kelompok modernis. Lembaga ini dipimpin oleh Abdullah Ujong Rimba yang merupakan tokoh penting organisasi PUSA. Belakangan lembaga-lembaga yang menjadi wadah modernis, baik pemerintah, non pemerintah, semi pemerintah, semakin banyak. Seperti Dinas Syariat Islam, Badan Baitul Mal, dan sebagainya. Namun situasi sekarang lebih menguntungkan karena sudah mulai banyak modernis yang berpandangan progresif.

Di samping itu, kelompok modernis juga memiliki aktivitas pada lembaganya masing-masing. Organisasi-organisasi besar modernis merupakan cabang dari organisasi modernis Nasional. Mereka tidak ikut terlibat dalam gerakan pemberontakan yang pernah terjadi. Bahkan banyak di antara mereka yang pemikirannya berbeda dengan banyak modernis dan menjadi intelektual progresif. Berbeda dengan organisasi modernis lokal, organisasi modernis Nasional mampu menanamkan nilai-nilai nasionalisme bagi kader-kadernya, meskipun memang pemahaman agamanya berbeda dengan kelompok tradisional.

Meskipun sedikit banyaknya mampu memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan di Aceh, lembaga pendidikan modernis, yakni madrasah, dalam alur sejarahnya, dipandang sebagai lembaga pendidikan alternatif. Baru pada masa Munawir Sjadzali madrasah mulai memiliki kualitas pendidikan yang lebih unggul ketika didirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) pada 1987. Program ini terhitung berhasil. Dua puluh tahun setelah didirikan, MAPK membuktikan kualitasnya dengan para alumni berkualitas terserap dalam lembaga birokrasi keagamaan. Pasca MAPK, muncul kembali gagasan madrasah berkualitas tinggi yakni MAN Insan Cendikia. MAPK sendiri bahkan berhasil melahirkan banyak intelektual progresif.

Di Aceh, dari berbagai produk modernis yang dihasilkan, formalisasi agama merupakan sesuatu yang mampu merubah fenomena sosial di Aceh. Uniknya, formalisasi agama ini tidak didukung oleh keseluruhan kelompok modernis. Banyak modernis progresif dan liberal malah menentang formalisasi agama karena menurut mereka, agama tidak boleh dijadikan sebagai sistem formal karena ia merupakan landasan nilai dan landasan inspirasi, bukan landasan

sistem dan bukan landasan aspirasi. Uniknya lagi, formalisasi agama yang secara historis merupakan hasil usaha modernis, namun didukung dengan sangat bersemangat oleh kelompok tradisional. Dukungan ini muncul karena dalam sistem formalisasi agama, frasa-frasa agama kerap muncul. Padahal kelompok tradisional sendiri sebenarnya tidak memiliki hubungan erat dengan sistem birokrasi.

Peta Sosial Aceh Pasca Formalisasi Agama

Dalam sejarah awal modernisme, sekolah oleh mayoritas masyarakat dianggap sebagai produk pendidikan yang mengarahkan manusia untuk menjadi kafir karena didirikan dan dikelola oleh kafir Belanda. Anggapan sekolah merupakan lembaga pendidikan kafir tidak hanya berlaku pada masa pemerintah kolonial. Bahkan hingga awal Orde Baru, masih banyak masyarakat yang enggan menghantarkan anaknya ke sekolah karena masih menganggap itu merupakan usaha pengkafiran. Sebab itulah, banyak masyarakat yang masih memilih mendidik anaknya di dayah. Hal ini juga yang menjadi bukti kenapa dayah dapat menjadi representasi mayoritas masyarakat di Aceh. Belakangan, meskipun banyak anak yang telah berpendidikan sekolah dan madrasah, namun tidak dibenarkan untuk tidak mengenyam pendidikan pada jenjang dayah, meskipun hanya mengaji dari rangkang, bale, hingga meunasah. Bahkan sangat banyak yang tetap melanjutkan pendidikan hingga dayah meskipun pagi hari mereka pergi ke sekolah atau madrasah.

Madrasah sebenarnya tidak menjadi pilihan mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat rural. Selain karena keberadaan madrasah tidak semasif sekolah, khususnya sejak Orde Baru, madrasah yang merupakan lembaga pendidikan modernis, menjadi alternatif bagi sebagian kelompok tradisional; daripada harus ke sekolah yang tidak mempelajari ilmu agama. Namun sebagian masyarakat yang di desanya terdapat rangkang, bale, dan meunasah yang memiliki kualitas pendidikan agama yang baik, memilih menghantarkan anaknya ke sekolah karena itu dapat diimbangi oleh jenjang-jenjang di bawah dayah tersebut.

Jenjang sekolah seseorang bisa bercampur antara sekolah, madrasah, dan dayah.

Tetapi, sesuai dengan prinsip identitas dan nonkontradiksi,²⁶ tidak ada yang dapat disebut identitas hibrid atau identitas ganda. Bekal pengetahuan, paradigma, dan pola pikir seseorang haruslah antara menjadi sekularis, modernis, atau tradisional. Seseorang dapat saja menempuh pendidikan sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, tetapi paradigmanya modernis. Itu kerap terjadi di Indonesia umumnya, dan di Aceh khususnya, akibat kekurangan porsi belajar agama, setelah memiliki penghidupan yang layak, keluarga yang harmonis, barulah hal selanjutnya yang ditatap adalah kematian. Sehingga muncul keperluan untuk menjadikan agama sebagai penyelamat setelah kematian. Barulah dia mulai menyibukkan diri dengan pembelajaran agama. Tentu saja model belajar agama yang cepat adalah melalui sistem modernis tertentu. Sebab itulah banyak kelompok modernis tertentu menyiapkan setiap kebutuhan praktis kalangan alumni sekolah di kawasan urban dalam rangka memenuhi kebutuhan instan dalam beragama. Hasil umumnya adalah muncul sikap beragama yang reaksioner, simbolis, dan mengedepankan agama sebagai basis aspirasi. Mereka dapat dengan mudah terprovokasi dalam gerakan-gerakan yang mengatasnamakan diri gerakan bela Tuhan atau gerakan bela agama.

Sementara itu, sebagaimana terjadi di Aceh sepanjang abad kedua puluh, banyak insan dayah yang meskipun ikut bersekolah, namun fokus menimba ilmunya adalah di dayah. Sehingga tumbuh sebagai elit intelektual tradisional, namun tidak mendirikan dayah, melainkan bergabung bersama masyarakat umum dalam dunia profesi seperti menjadi petani, nelayan, pedagang, dan sebagainya, dalam paradigmanya, menganut sekularitas. Mereka membedakan dengan baik dimensi-dimensi sakral dan dimensi-dimensi profan. Sehingga mereka dapat menjadi sekular dalam makna Nurcholish Madjid.²⁷ Fenomena ini banyak sekali ditemukan di Aceh secara masif. Merekalah yang membentuk identitas masyarakat Aceh secara utuh. Mereka tidak mengenakan simbol-simbol agama yang mencolok. Mereka menjadikan agama sebagai inspirasi. Mereka adalah orang-orang yang memahami agama secara utuh. Sehingga dapat membedakan mana yang harus didahulukan dan mana yang dapat didiskusikan. Mereka sangat toleran dengan segala bentuk perbedaan. Mereka memang kelompok tradisional, tetapi tidak

²⁶ Miswari, *Filsafat Pertama* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 25.

²⁷ Greeg Barton, *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999), 121-22.

mempersoalkan sekularitas karena mereka paham bahwa dimensi-dimensi profan itu adalah kepentingan manusia yang pendekatannya memang berbeda dengan hal-hal sakral. Mereka sangat mudah menemukan titik temu dengan kelompok sekuler.

Meskipun tidak menempuh jenjang dayah hingga tingkat tinggi, tetapi umumnya masyarakat berpandangan tradisional, namun tidak dapat disebut sebagai kelompok elit (intelektual) tradisional. Porsi sekularitas yang dimiliki itu seharusnya dapat diisi dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Namun sayangnya “jarak” antara Jakarta dan Aceh terlalu jauh, informasi-informasi penting terlambat hadir. Misalnya koran nasional baru tiba sore hari, sementara majalah Nasional yang terbit Senin pagi baru tiba Kamis sore. Dalam sejarah Aceh abad kedua puluh, itu membuat kelompok tertentu mudah saja menyampaikan informasi versi mereka. Fenomena ini menyebabkan gerakan subversi menjadi masif karena kelompok yang mengusungnya membawa ide-ide sekularitas seperti ketidakadilan sosial. Semangat perjuangan keadilan yang diperjuangkan dalam bentuk chauvanisme menghantarkan pada tindakan subversi diterima dengan masif sekalipun idenya berdimensi sekular, karena memang masyarakat Aceh secara umum yang merupakan tradisional, tidak memiliki masalah dengan dimensi-dimensi sekular.

Fenomena gerakan subversi yang berlangsung hingga akhir abad kedua puluh dan memasuki abad kedua puluh satu dapat menyentuh akar rumput, sehingga terjadi secara masif adalah karena agenda yang diusung bukanlah kepentingan elite modernis melainkan agenda yang bersifat sekular. Dalam ketegangan ini, kelompok modernis hadir menawarkan formalisasi agama sebagai solusi. Namun sebenarnya solusi formalisasi agama bukan merupakan agenda sebagian elit sekular yang menggerakkan subversi, melainkan agenda modernis. Tetapi gerakan formalisasi agama dapat merawat perdamaian karena mengusung simbol-simbol agama yang dianggap masyarakat akar rumput sebagai narasi yang mereka inginkan, meskipun kontennya merupakan aktualisasi didominasi utopia modernis. Meskipun demikian, dalam kemenangannya dalam mengusung ide formalisasi agama, tidak sedikit kebijakan-kebijakan formalisasi agama mengundang pertanyaan-pertanyaan dalam masyarakat. Misalnya kebijakan singularisasi sistem keuangan yang merupakan penanda penting kemenangan modernis, saat mereka bereuforia, masyarakat menghadapi banyak keluhan.

Tinjauan kembali kebijakan singularitas sistem keuangan diajukan oleh kelompok politik dominan mantan pelaku subversi. Karena memang kelompok ini tidak mengukung simbolisme agama sebagai aspirasi. Kewajiban mereka sebagai pelaku politik dominan adalah menyejahterakan masyarakat. Mereka punya tanggungjawab besar untuk membuktikan bahwa mereka mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebab itulah, bila terdapat potensi menghambat harapan kesejahteraan itu, mereka berkewajiban mengoreksinya.

Gagasan kelompok politik dominan dalam rangka menawarkan peninjauan kembali singularitas sistem keuangan tidak mendapatkan penolakan berarti dari kelompok tradisional. Karena memang sejatinya segala bentuk formalisme keagamaan adalah aspirasi modernis. Pihak yang benar-benar menentang aspirasi untuk mengoreksi singularitas sistem keuangan adalah pihak modernis. Tentu saja mereka benar-benar tidak bahagia dengan gagasan koreksi singularitas sistem keuangan karena bila itu terjadi, bukan tidak mungkin banyak utopia modernis yang telah dikonstitusikan akan ditinjau kembali.

Kelompok tradisional sendiri sebenarnya tidak punya agenda tertentu dalam formalisasi agama. Karena memang mereka sejak awal menjadikan agama sebagai inspirasi. Agama mengisi nilai kehidupan. Hal ini berbeda dengan sebagian besar modernis yang menjadikan agama sebagai aspirasi dan perayaan simbol. Sistem keuangan, sistem regulasi hukum, merupakan agenda-agenda modernis yang punya frekuensi kuat atas konstitusi, sistematika, manajemen administrasi. Namun bukan berarti kelompok tradisional tidak mendapatkan keuntungan dalam agenda formalisasi agama.

Pertumbuhan lembaga pendidikan modernis dan perkembangan akomodasi agenda-agenda modern oleh tradisional dalam rangka mempertahankan sistem tradisional tentu saja berdampak pada pertumbuhan elit tradisional yang mengukung ide-ide pembaruan. Fenomena ini melahirkan banyak tradisional yang peka terhadap sistem birokrasi sehingga mereka membutuhkan wadah aktualisasi diri. Oleh sebab itu, mulai banyak tradisional yang ikut mengisi lembaga-lembaga birokrasi, khususnya terkait birokrasi agama dan perguruan tinggi Islam. Tidak hanya itu, ruang-ruang urban mulai diisi oleh elit tradisional dengan berbagai bidang usaha seperti warung kopi, toko pakaian, dan

sebagainya. Hal ini tentu saja mewarnai wajah ruang-ruang urban.

Usaha-usaha untuk birokratisasi lembaga pendidikan tradisional juga mulai terjadi. Misalnya didirikan lembaga birokrasi untuk mengurus sistem pendidikan tradisional. Memang usaha untuk mengintervensi kurikulum belum terjadi. Tetapi tidak dapat dipastikan itu tidak akan terjadi. Arah menuju ke sana menjadi semakin mudah, karena meskipun lembaga tersebut didominasi modernis, namun elite tradisional mulai dilibatkan. Bila itu terjadi, identitas esensial tradisional dapat bergeser.

Mengenai perkembangan tradisionalis, memang merupakan keniscayaan sejarah. Terlambatnya modernisasi masuk ke Aceh juga berdampak pada terlambatnya tradisionalis mengisi ruang urban. Padahal di Jawa, kebangkitan tradisionalis terjadi begitu cepat. Kebangkitan ini diiringi dengan mundurnya dominasi modernis pada lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan, khususnya bidang-bidang yang menekuni urusan keagamaan. Di antara sebab kemunduran intelektual modernis adalah hilangnya reaksi atas komunisme dan liberalisme Barat.

Dalam perkembangannya, gelombang pasang modernisme di Indonesia terjadi dalam beberapa tahap. Pertama adalah pada masa Hindia Belanda, yakni ketika organisasi-organisasi Islam didirikan, seperti SI dan JIB. Juga di Aceh dibukanya cabang organisasi modernis nasional, serta didirikannya beberapa organisasi modernis lokal seperti Islam Menjadi Satu dan Perkumpulan Usaha Sama Kemajuan Aceh. Kemudian didirikannya madrasah-madrasah, dan puncaknya pada pendirian PUSA. Organisasi-organisasi modernis tersebut merupakan reaksi atas kemajuan sekolah dan birokrasi yang dibawa Belanda dari Barat.

Kemudian pada masa Pendudukan Jepang, terdapat beberapa penanda kebangkitan modernis yakni didirikannya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wadah birokratisasi agama.²⁸ Lembaga ini merupakan penanda penting kemajuan modernis karena sebelumnya urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan dan perceraian belum dikelola secara sistematis oleh negara. Penanda lainnya adalah didirikannya Masyumi yang merupakan wadah politik kelompok modernis, meskipun tradisionalis sempat terlibat. Sementara pada masa Orde Lama, modernis bangkit dengan gerakan Masyumi dalam rangka menentang kebangkitan partai

²⁸ Azyumardi Azra, *Japan, Islam, the Muslim World and Indonesia: Past and Present* (Jakarta: The Japan Foundation, 2005).

komunis.

Komunisme yang telah dilenyapkan pada 1965 bahkan terus-menerus menjadi isu bagi kelompok modernis. Pada masa Orde Baru, bahkan era Reformasi sekalipun, komunisme masih menjadi perbincangan modernis, khususnya mereka yang berada pada garis ideologi Masyumi. Baik pada masa Orde Baru maupun Reformasi, komunisme menjadi isu hangat yang terus dibicarakan kelompok modernis. Bahaya laten komunis menjadi doktrin dalam kaderisasi dan gerakan modernis. Hal ini juga yang menjadi pemicu kebangkitan gerakan-gerakan Islam modernis.

Di samping komunisme, spirit lainnya yang menjadi pemicu kebangkitan modernis adalah westernisasi yang diisukan membawa umat Islam kepada sekularisme, liberalisme, dan pluralisme²⁹ Sekularisme yang dipahami sebagian besar modernis adalah usaha menyingkirkan agama. Sementara liberalisme dipahami sebagai gaya hidup yang bebas sebenar-bebasnya tanpa norma apapun. Pluralisme dipahami sebagai itikad yang menganggap sama semua agama.³⁰

Belakangan, baik komunisme maupun westernisasi, tidak lagi diperbincangkan kelompok modernis. Hal itu juga yang membuat intelektualisme modernis surut. Kemunduran ini didukung juga oleh sistem-sistem yang semakin ketat. Sekolah-sekolah telah menetapkan jam belajar yang ketat sehingga organisasi-organisasi modernis menjadi kesulitan berpartisipasi bagi pelajar. Kampus-kampus juga semakin ketat dalam pengawasan masuknya organisasi-organisasi modernis. Hal ini terjadi akibat terlalu banyaknya organisasi modernis transnasional yang mencoba melakukan indoktrinasi kepada pelajar dan mahasiswa yang membuat mereka menjadi radikal. Khususnya bagi kampus-kampus umum, doktrin-doktrin radikal dan fundamentalisme sangat berbahaya karena bekal keilmuan agama mahasiswa banyak yang tidak mendalam. Mereka menjadi mudah terpengaruh oleh propaganda-propaganda bersimbol agama.

Berbagai perguruan tinggi keagamaan juga mulai diisi oleh pengajar yang berasal dari latar belakang pendidikan sekuler. Banyak juga pengajar yang berlatarbelakang tradisional. Dua pihak ini tentu saja kurang sependapat dengan utopia-utopia modernis yang ingin ditawarkan

²⁹ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 16.

³⁰ Adian Husaini, "Pluralisme Agama Dan Persoalan Teologi Kristen," in *Pluralisme Agama: Telaah Kritis Cendekiawan Muslim* (Jakarta: INSIST, 2013), 85.

kepada masyarakat. Khususnya di Aceh, modernis di perguruan tinggi keagamaan masih memiliki gaung yang kuat karena utopia yang ingin dimajukan didukung oleh sistem formalisasi agama yang ditetapkan. Modernis di perguruan tinggi keagamaan sangat berhasrat menerapkan gagasan utopisnya tanpa mempedulikan teknis permasalahan yang dihadapi masyarakat. Bahkan mereka berhasil memprovokasi mahasiswa untuk mendukung gagasannya. Misalnya singularisasi sistem keuangan yang ingin dikoreksi oleh beberapa pihak, ikut ditentang dengan demonstrasi mahasiswa. Padahal pihak yang sangat dirugikan oleh singularitas sistem itu adalah pihak mahasiswa sendiri. Hari ini banyak kantor-kantor unit lembaga keuangan yang tutup. Sehingga tentu saja mahasiswa perbankan yang nantinya semakin kesulitan mencari pekerjaan. Bahkan mendapatkan tempat praktik pengalaman lapangan juga semakin sulit. Padahal bila pluralitas sistem keuangan masih berlaku, peluang penyerapan lulusan perguruan tinggi menjadi lebih terbuka.

Memang alumni-alumni madrasah unggul telah mengisi posisi-posisi penting dalam lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga-lembaga keagamaan, namun mereka adalah insan yang berpikiran maju, sehingga umumnya tidak tergolong kepada modernis yang utopis dan simbolis. Bahkan sebagian mereka berpikiran sekular dalam arti yang dipahami Nurcholish Madjid. Tidak sedikit di antara mereka yang menentang gagasan-gagasan utopia dan sistem-sistem formalistik. Di antara mereka sudah mulai memperhatikan kemunduran modernis dengan cara merevolusi madrasah-madrasah. Sehingga beberapa madrasah dan pesantren modern belakangan mulai menjadi lembaga pendidikan elite dan unggul sebagaimana masa awal kelahirannya. Madrasah-madrasah yang pernah menjadi tempat siswa kurang berprestasi dan telah mengusung masalah untuk pindah, menjadi lembaga pendidikan paling elite di daerahnya. Namun tampaknya hal itu tidak akan bertahan lama karena beberapa madrasah dan pesantren modern elite itu mulai menurut kembali popularitasnya.

Dalam peta sosial Aceh, formalisme agama yang merupakan gagasan modernis, didukung oleh tradisionalis akibat simbol-simbol keagamaan yang diusung, membuat kelompok sekular tidak dapat berbuat banyak. Kelompok sekular yang mendominasi partai politik dan pemerintahan tidak dapat mengambil sikap frontal dan malah cenderung mendukung karena mereka mempertimbangkan elektabilitas. Bahkan di beberapa daerah, tindakan-tindakan yang

mengarah kepada intoleransi masih mendapatkan dukungan pemerintah daerah setempat.³¹

Perguruan tinggi sekular sendiri juga terkadang harus bersikap nyaris sama dengan pemerintah-pemerintah daerah dan penguasa politik dominan. Mereka cenderung bungkam dan tidak melakukan usaha untuk menawarkan alternatif dari utopia modernis. Meskipun mereka punya solusi yang baik dalam rangka menyejahterakan masyarakat, namun program perencanaan dan hasil penelitian mereka untuk menyejahterakan masyarakat, kurang diperhatikan karena oleh para petinggi politik, itu tidak dapat menjadi ajang yang dapat menaikkan popularitas mereka. Salah satu faktor yang dapat menaikkan elektabilitas politik adalah agenda-agenda yang mengusung simbolisme agama. Sementara agenda-agenda konkrit yang dapat menyejahterakan masyarakat, jarang mengandung konten-konten simbol semacam itu.

Kesimpulan

Kehadiran Kolonialisme Belanda di Aceh menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan pembentukan elite intelektual yang terbagi menjadi tiga kelompok yakni tradisional, modernis, dan sekular. Tradisional adalah kelompok yang fokus pada kajian agama sistematis, mendalam, dan bersanad. Mereka membangun keagamaan berbasis sosial dan tidak punya kedekatan intens dengan sistem birokrasi dan mereka mendominasi karena tersebar dalam masyarakat rural. Sementara modernis mendominasi ruang urban, sebagian di antaranya mengusung utopia keagamaan sehingga mengupayakan birokratisasi agama karena mereka punya kedekatan erat dengan sistem-sistem birokrasi. Usaha modernis terwujud dalam formalisasi agama yang turut didukung oleh kelompok tradisional karena mengusung frasa-frasa agama. Sekalipun sekularis paham bahwa utopia modernis tidak mengarah pada esensi kesejahteraan sosial, namun mereka tidak punya banyak pilihan karena bila menentang aktualisasi utopia modernis, akan dianggap tidak mendukung agama. Meskipun demikian, masih banyak modernis yang menolak utopia dan menjadi pemikir progresif. Bahkan mereka melakukan evaluasi esensial atas formalisasi keagamaan.

Daftar Pustaka

³¹ Miswari, "Mu'ḍilat Al-Aqlīyah Al-Masīhīyah Fī Ḥudūd Balad Al-Sharī'ah Al-Islāmīyah," *Studia Islamika* 25, no. 2 (2018): 351, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/6978/4720>.

- Abidin, Zainal. "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Harmonisasi Antara Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemoderenan." *Humaniora* 5, no. 2 (October 30, 2014): 665. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3123>.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. "Educational Practice: Lessons to Be Learned from Madrasah and Religious Schools in Contemporary Southeast Asia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 1 (June 1, 2015): 29. <https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.29-48>.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam Dan Filsafat Sains*. Bandung: Mizan, 1995.
- Alfian. "Ulama Dalam Masyarakat Aceh." In *Islam Di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*, 176. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Alkaf, Muhammad. "Aceh Pasca 2005: Ruang Politik Untuk Syariat Islam." In *Islam, Formalisasi Syariat Islam Dan Post-Islamisme Di Aceh*, edited by Miswari, 7. Banda Aceh: BandarPublishing, 2019.
- Arrauf Nasution, Ismail Fahmi, Miswari Miswari, and Ilham Dwitama Haeba. "Traditionalism of Tolerance in Dayah System: A Reflective Note on the Biography of Abon Aziz Samalanga of Aceh." *Religia* 23, no. 1 (April 3, 2020): 1-21. <https://doi.org/10.28918/religia.v23i1.1957>.
- Azra, Azyumardi. *Japan, Islam, the Muslim World and Indonesia: Past and Present*. Jakarta: The Japan Foundation, 2005.
- . "Kartosuwiryo Dan NII: Kajian Ulang." *Studia Islamika* 21, no. 1 (July 21, 2014): 175-82. <https://doi.org/10.15408/sdi.v21i1.883>.
- Barton, Greeg. *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Basri, Hasan. *Melampaui Islam Substantif: Biografi Politik Ali Hasjmy*. Langsa: Zawiyah, 2015.
- Damanik, Ahmad Taufan. *Hasan Tiro Dari Imajinasi Negara Islam Ke Imajinasi Etno-Nasionalis*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI), 2010.
- Fahmi Arrauf Nasution, Ismail, Miswari Miswari, and Sabaruddin Sabaruddin. "Preserving Identity through Modernity: Dayah Al-Aziziyah and Its Negotiations with Modernity in Aceh." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (July 30, 2019): 211-32. <https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.06>.
- Fauzan, Fauzan. "Sekularisasi Dalam Pandangan Harvey Cox." *KALAM* 6, no. 2 (February 25,

- 2017): 251. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i2.406>.
- Husaini, Adian. "Pluralisme Agama Dan Persoalan Teologi Kristen." In *Pluralisme Agama: Telaah Kritis Cendekiawan Muslim*, 85. Jakarta: INSIST, 2013.
- . *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ilyas, Mukhlisuddin. *Pendidikan Dayah Di Aceh Mulai Hilang Identitas*. Yogyakarta: Pale Indonesia Media, 2012.
- Ismail, Ismail, and Mukhlis Mukhlis. "Dari Islamisasi Ilmu Menuju Pengilmuan Islam: Melawan Hegemoni Epistemologi Barat." *Ulumuna* 17, no. 1 (November 8, 2017): 65–96. <https://doi.org/10.20414/ujis.v17i1.174>.
- Liata, Nofal. "Islam Aceh Dan Walisongo." Accessed July 30, 2023. <https://nofalliata.wordpress.com/agama-islam-dan-sekte-sektenya/islam-aceh-dan-walisongo-2/>.
- Miswar, Khairil. "Bireuen Sebagai Kota Pendidikan." *Pikiran Merdeka*, 2018. <https://www.pikiranmerdeka.co/news/bireuen-sebagai-kota-pendidikan/>.
- Miswari. *Filsafat Pertama*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- . "Kesultanan Samudra Pasai Dan Strateginya Dalam Islamisasi Nusantara." *Liwaul Dakwah* 12, no. 1 (2022): 40–60.
- . "Mu‘dilat Al-Aqlīyah Al-Masīhīyah Fī Ḥudūd Balad Al-Sharī‘ah Al-Islāmīyah." *Studia Islamika* 25, no. 2 (2018): 351. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/6978/4720>.
- . *Perbandingan Wujudiah Hamzah Fansuri Dan Filsafat Mulla Sadra*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Nasution, Ismail Fahmi Arrauf, and Miswari. "Rekonstruksi Identitas Konflik Kesultanan Peureulak." *Paramita* 27, no. 2 (2017): 168–81. <https://doi.org/10.15294/paramita.v27i2.11159>.
- Nasution, Ismail Fahmi Arrauf, and Miswari. "Al-‘Ulamā’ Warathat Al-Anbiyā’: Modernity and Nurture of Authority in Aceh Society." *Jurnal THEOLOGIA* 30, no. 2 (December 23, 2019): 197. <https://doi.org/10.21580/teo.2019.30.2.3845>.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. 8th ed. Jakarta: LP3ES, 1996.

- Parlindungan, Firman, Irfan Rifai, Rahmat Nutihar, and Sofie Dewayani. "Fostering Peace and Harmony Through Indonesian Heroes Story: A Systematic Review of Literature." *Proceedings of the 4th International Conference on Progressive Education 2022 (ICOPE 2022)*, 2023, 356.
- Penelitian, Jurnal Inovasi, Oleh Sotardodo Siahaan, Afrizal Hendra, Wayan Midhio, and Universitas Pertahanan Kemhan. "Strategi Perang Semesta Dalam Perang Aceh (1873-1912)." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2537-48. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/517>.
- Reid, Anthony. *Asal Mula Konflik Aceh*. Jakarta: Buku Obor, 2007.
- Saifullah. *Pembaruan Pendidikan Islam Di Aceh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Wildan, Teuku, Sukiman Sukiman, and Amroeni Drajat. "Thinking of Kalam Ulama Aceh XX Century Shaykh Mudawali Al-Khalidi (1917-1961)." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* 2, no. 4 (November 26, 2019): 657-65. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.679>.